



PENGANTAR

Partisipasi dalam pengambilan keputusan di institusi pendidikan adalah satu langkah besar yang dapat dilakukan masyarakat atau publik. Namun, partisipasi publik sering kali tidak jauh dari merespons isu yang sudah didefinisikan oleh pihak lain, baik oleh negara, lembaga internasional, dan pemimpin politik. Partisipasi efektif membutuhkan *power* atau kekuasaan yang lebih dari sekadar bersuara untuk memberikan umpan balik atau mendukung sebuah kebijakan. Publik juga perlu kekuasaan untuk merumuskan masalah dari sudut pandang mereka, membangun wacana yang sebelumnya bisa jadi bukan merupakan bahasan, apalagi menjadi prioritas pembuat kebijakan.

Pengetahuan, informasi, atau data adalah aset yang penting untuk membangun partisipasi efektif dalam pendidikan. Menggunakan empat referensi daring (dalam jaringan) yang diluncurkan Kemdikbud terkait data pendidikan di tingkat daerah dan nasional, publik dapat merumuskan masalah yang patut menjadi prioritas. Di tingkat yang berbeda, partisipasi Indonesia dalam forum internasional juga merupakan langkah penting, bukan saja untuk memperkaya wacana pendidikan, tetapi untuk memengaruhi tren global tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan

dan strategi pendidikan internasional. Kedua topik tersebut disampaikan pada Kilas Pendidikan edisi ketiga ini.

Untuk terus menguatkan diskursus tentang pembelajaran dan metode penilaian yang efektif, Kilas Pendidikan edisi ini juga mengulas isu terkait Ujian Nasional dan pendekatan dalam pelatihan guru. Keduanya mengindikasikan bahwa diskursus tentang metode yang digunakan untuk mengukur kualitas belajar serta pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas guru adalah isu-isu yang harus terus didiskusikan, diperdebatkan, serta dipikirkan bersama.

Sebagai kesimpulan, partisipasi membutuhkan pengetahuan yang dapat menggerakkan publik untuk melakukan perubahan secara kolektif. Namun, proses konstruksi pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan. Maksudnya, kekuasaan yang dimiliki suatu kelompok dapat menggiring opini serta mendefinisikan masalah dan prioritas dalam pendidikan. Sebagai bagian dari bangsa yang tanpa henti bergerak menuju demokrasi, Kilas Pendidikan terus berupaya untuk memublikasikan berbagai ulasan agar publik semakin memiliki kuasa dalam berpartisipasi membangun pendidikan bangsa.

Pemimpin Redaksi: Nisa Faridz **Redaktur:** 1. Henny Supolo Sitepu 2. Ifa H. Misbach 3. Najelaa Shihab

Editor: Siti Nur Andini **Kontributor Tamu:** Elin Driana & Itje Chodidjah

Tajuk Edisi Ini:

KEBIJAKAN NASIONAL

Penyediaan Data Pendidikan dan Kebudayaan

TINJAUAN

Pesan dari *The Global Education and Skills Forum* 2016 Di Dubai: Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Bersama

ANALISIS & REKOMENDASI

Redefinisi Kesuksesan Siswa

GERAKAN PENDIDIKAN

Pelatihan Tiga Lapis: Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru dalam Berbagai

AGENDA PSPK

Pesta Pendidikan Barengan

KEBIJAKAN NASIONAL

PENYEDIAAN DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada 21-23 Februari 2016 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan empat inisiatif baru terkait penyediaan informasi pendidikan dan kebudayaan kepada publik luas. Kemdikbud menyatakan inisiatif ini diwujudkan sebagai bentuk komitmen Kemdikbud dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan di mana seluruh elemen di dalamnya turut terlibat aktif.

Empat inisiatif penyediaan data kepada publik tersebut adalah:

1. Sekolah Kita (<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>)

Inisiatif ini lebih diarahkan pada orangtua sebagai target pemirsa. Berisi data dan informasi tentang seluruh sekolah di Indonesia yang sudah terdaftar di Dapodik, Sekolah Kita dirancang untuk mudah digunakan dari perangkat ponsel cerdas sekalipun. Beberapa data yang ditampilkan di antaranya alamat dan kontak sekolah, nama kepala sekolah, sarana dan prasarana yang tersedia, jumlah siswa, jumlah guru, sampai foto-foto lingkungan sekolah. Kemendikbud merencanakan untuk menampilkan pula data kinerja sekolah dari berbagai pemetaan,



Gambar 1. Laman depan Sekolah Kita



Gambar 2. Laman depan Jendela Pendidikan dan Kebudayaan

seperti nilai UN, IIUN, UKG, dll. Pada laman ini juga terdapat fitur untuk memberikan masukan dan opini terkait suatu sekolah.

2. Jendela Pendidikan dan Kebudayaan (<http://jendela.data.kemdikbud.go.id>)

Berbeda dengan Sekolah Kita, Jendela Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan kepada publik luas sebagai target pemirsa. Jendela Pendidikan dan Kebudayaan menampilkan empat kategori informasi pada suatu wilayah yang dapat dipilih, yaitu: Indikator dan Kajian, Potret Pendidikan,

Program Pembangunan, serta Sosial Budaya dan Bahasa. Kemungkinan pemanfaatan Jendela Pendidikan dan Kebudayaan ini paling luas dibandingkan inisiatif lain; mulai dari perusahaan swasta yang ingin mengkaji di area mana mereka dapat berkontribusi pada pendidikan dan kebudayaan, sampai guru yang mencari kegiatan kebudayaan di sekitar sekolahnya untuk diperkenalkan kepada murid-muridnya.

3. Neraca Pendidikan Daerah (<http://npd.data.kemdikbud.go.id>)



Gambar 3. Laman depan Neraca Pendidikan Daerah

Neraca Pendidikan Daerah atau NPD dirancang sebagai ringkasan kinerja pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dengan membandingkan parameter input, seperti anggaran daerah untuk pendidikan, dan parameter output, seperti kondisi sarana-prasarana sekolah, tingkat buta aksara, komposisi akreditasi sekolah, komposisi guru tersertifikasi, nilai UKG, dan nilai UN. NPD ditujukan bagi pengambil keputusan di daerah serta berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan untuk mengawasi pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. NPD juga dimaksudkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bahwa banyak kewenangan pengelolaan pendidikan telah berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan memerlukan pengawasan publik.

4. Statistik Pendidikan (<http://publikasi.data.kemdikbud.go.id>)

Sesuai namanya, Statistik Pendidikan berisikan laporan data statistik pendidikan dalam bentuk

dokumen .pdf yang mudah diunduh dan dicetak. Data pada laman ini disusun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kemdikbud ini lebih ditujukan kepada para akademisi dan peneliti, juga bagi para jurnalis.

Keempat inisiatif penyediaan informasi pendidikan dan kebudayaan kepada publik luas ini patut diapresiasi sebagai langkah memberdayakan para pelaku dalam ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Walaupun merupakan langkah awal yang signifikan, namun inisiatif tak boleh berhenti sampai di sini. Seperti inisiatif pemerintah yang lain, sering kali kelemahannya ada pada proses sosialisasi ke publik serta penyusunan insentif bagi publik untuk mau memanfaatkan berbagai inisiatif yang telah digagas secara aktif dan terus-menerus. Publik juga perlu dilibatkan dalam verifikasi data dan diberikan jalur untuk memberikan data pembandingan dan memperkuat akurasi. Proses keterbukaan dan demokratisasi data seperti ini akan menjadi bahan bakar bagi pelibatan publik dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.



Gambar 4. Laman depan Statistik Pendidikan

THE GLOBAL EDUCATION AND SKILLS FORUM 2016 DI DUBAI: PENDIDIKAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB BERSAMA

oleh: Elin Driana,

Dosen Sekolah Pascasarjana,

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta

“Taking Greater Collective Responsibility for Public Education” merupakan tema yang diusung dalam *The Global Education and Skills Forum* di Dubai yang diselenggarakan pada 12-13 Maret 2016 dan merupakan forum yang keempat kalinya. Ajang tahunan yang digagas oleh Varkey Foundation menghimpun pengambil kebijakan di bidang pendidikan, perwakilan dari sektor swasta, akademisi, guru, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil dari berbagai negara untuk bersama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan baru dan kompleks di bidang pendidikan.

Melalui berbagai perbincangan kritis yang dikemas dalam bentuk panel, diskusi dengan tokoh-tokoh di bidang pendidikan ataupun debat dapat ditarik benang merah bahwa berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan berbagai negara dipandang telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan. Akan tetapi, mutu dan relevansi pendidikan masih menjadi persoalan. Terlebih lagi, kehidupan masyarakat dan lapangan pekerjaan di berbagai bidang telah mengalami perubahan-perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya yang juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, termasuk teknologi informasi. Kecepatan perubahan tersebut menuntut dunia pendidikan beradaptasi dan berinovasi dalam mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kecakapan, dan karakter yang dibutuhkan di masa depan.

Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Kecakapan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam rangkaian acara pembukaan, menyebutkan bahwa pendidikan harus melengkapi siswa dengan pengetahuan yang relevan

dengan kebutuhan Abad 21, yaitu berpikir sistem (*system thinking*), berpikir desain (*design thinking*), literasi informasi (*information literacy*), literasi digital (*digital literacy*), dan literasi global (*global literacy*). Pendidikan harus memberi ruang pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas (*creativity*), berpikir kritis (*critical thinking*), menyelesaikan masalah (*problem solving*), berinovasi (*innovation*), berkolaborasi (*collaboration*), mengumpulkan data (*data gathering*), dan berkomunikasi (*communication*). Selain itu, peserta didik perlu mengembangkan karakter yang merupakan kunci kesuksesan, yaitu: empati (*empathy*), ketangguhan (*resilient*), kesadaran diri (*mindfulness*), sikap inklusif, rasa ingin tahu (*curiosity*), etika (*ethics*), keberanian (*courage*), dan kepemimpinan (*leadership*).

Salah satu kunci penting untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan adalah peningkatan mutu guru melalui pengembangan kompetensi guru secara tepat dan berkelanjutan, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam panel dengan topik *“The Teachers of 2030: What will They Look Like?”*, keempat panelis, salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan, berpandangan bahwa kompetensi guru harus terus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan mengubah kehidupan manusia, termasuk ragam pekerjaan di masa depan. Anies Baswedan menyatakan bahwa terdapat empat tingkatan peran guru. Pertama, untuk mengajar; kedua, untuk mendidik; ketiga, untuk menginspirasi siswa; dan keempat, untuk menggerakkan siswa. Anies Baswedan berpendapat bahwa teknologi dapat menggantikan peran guru untuk mengajar, tetapi tidak untuk mendidik, menginspirasi, ataupun menggerakkan siswa. Menurutnya lagi, teknologi bukanlah pengganti guru, tetapi pelengkap bagi guru. Dengan demikian, guru harus terus meningkatkan kompetensinya agar perannya tidak digantikan oleh teknologi.

Dalam panel bertopik *“Millions Learning: Is Technology or Politics More Important for Scaling Quality Learning?”*, Rashmi Kathuria, seorang guru di Kulachi Hansraj Model School, India, menyatakan bahwa pembelajaran yang bermutu membutuhkan sistem pendukung di sekolah dan dukungan pemerintah untuk memastikan agar

guru-guru dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kathuria juga berbagi pengalaman dalam berkolaborasi dengan guru-guru lain, bahkan dengan siswa, dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Berdasarkan pengalamannya, sering siswa memunculkan gagasan-gagasan baru dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Shannon May, Co-Founder Bridge International Academies, Kenya, mengingatkan bahwa guru-guru perlu mendapatkan dukungan dalam menggunakan teknologi, misalnya melalui pelatihan berkesinambungan dan gagasan-gagasan dalam memanfaatkan teknologi yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan.

The Global Education and Skills Forum 2016 di Dubai ini menegaskan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, termasuk peningkatan mutu guru, membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pesan ini pun selaras dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (6) yang menyatakan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan."

ANALISIS & REKOMENDASI

REDEFINISI KESUKSESAN SISWA

Ujian Nasional (UN) 2016 akan kembali diselenggarakan pada awal April 2016. Pembicaraan tentang mutu pendidikan biasanya kembali "menghangat" selama periode ini, sampai UN berikutnya. Memandang kesuksesan dari prestasi akademik yang diukur dengan ujian terstandar adalah jebakan lama. Tentu, prestasi akademik dan ujian terstandar penting. Keduanya juga populer karena mudah diukur dan dipahami. Capaian nilai ujian terstandar dari tahun ke tahun disederhanakan interpretasinya untuk menunjukkan peningkatan mutu. Hasil UN menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan, alat "transaksi" mengapresiasi atau menghukum daerah, sekolah, dan siswa. Penting disadari bahwa indikator ini tidak sempurna, tidak juga 100% akurat menggambarkan kesuksesan. Penggunaan hasil ujian sebagai indikator tunggal sering makin menjauhkan pemahaman kita tentang mutu pendidikan di setiap kelas pada setiap siswa.

Langkah Kemdikbud tahun lalu yang melakukan perubahan fungsi UN sebagai pengukuran kompetensi dan bukan penentu kelulusan, selayaknya ditindaklanjuti dengan menjawab tantangan berikutnya dalam penilaian mutu pendidikan dan kesuksesan siswa. Wagner (2014) mengatakan, keberhasilan reformasi pendidikan negara amat dipengaruhi oleh perubahan proses penilaian dengan lebih akurat dan berbagai tolok ukur. Pengenalan Indeks Integritas UN merupakan salah satu langkah

maju yang juga menjadi indikator kesuksesan mutu pendidikan. Indeks ini sangat strategis karena program reformasi yang menggunakan kinerja siswa dan sekolah sebagai key performance indicator lebih efektif mendorong perubahan dibanding yang menggunakan indikator tidak langsung, misalnya kualitas sarana atau efektivitas guru (Harris, 2002).

Hikmah utama penentuan kelulusan oleh sekolah adalah kesadaran bahwa penilaian mutu pendidikan dan kesuksesan siswa tidak harus dilakukan terpusat. Penilaian berkelanjutan di sekolahlah yang membawa perubahan nyata. Otonomi satuan pendidikan dan dorongan profesionalisme guru tidak berarti apabila pendefinisian kesuksesan hanya digantungkan pada alat ukur negara. Bagi sistem pendidikan nasional, pemanfaatan data sekolah ini juga esensial untuk mekanisme umpan balik yang sehat. Selama ini, arus informasi lebih banyak terjadi dari pemerintah ke sekolah atau guru, bukan sebaliknya. Dalam strategi ke depan yang mengedepankan pelibatan publik, "suara" dan bukti praktik lapangan penting menjadi dasar kebijakan.

Indikator pemetaan yang dominan saat ini membandingkan siswa dengan standar "eksternal". Apabila sukses diartikan sebagai progres mencapai tujuan yang bermakna bagi yang menetapkannya, elemen perspektif siswa tidak terpisahkan. Siswa harus mampu menjadi individu yang lebih baik di matanya sendiri, bukan hanya di mata orang atau standar lain. Dengan tantangan baru pendidikan untuk membentuk pelajar seumur hidup, indikator kesuksesan siswa dituntut lebih luas dari kompetensi yang terukur ujian terstandar. Berbagai indikator

alternatif mulai dikembangkan dalam konteks negara, daerah, dan sekolah untuk menggambarkan mutu dengan komprehensif. De Ketele (2012) misalnya, mengembangkan pendekatan alternatif untuk pendidikan kewarganegaraan. Selain mengukur kompetensi berkait pemahaman siswa melalui ujian, dilakukan juga pengukuran tanggung jawab siswa terhadap komunitas. Indikator kesuksesannya adalah angka partisipasi siswa dalam manajemen berbasis sekolah. Di Chile, program “*Listening to Student Voice*” atau di Singapura, “*Student-centric, Values Driven*” menunjukkan penggunaan dan interpretasi berbagai data kesuksesan siswa mampu mendorong akselerasi mutu.

Melakukan pengukuran dampak terhadap siswa tidak mudah. Namun, indikator ini sama pentingnya dengan capaian rerata nilai UN atau angka partisipasi pendidikan. Apabila kita peduli pada pengembangan siswa yang utuh, diperlukan definisi dan pengukuran yang berbeda untuk memetakan mutu pendidikan. Indikator alternatif tidak menafikan pentingnya prestasi akademik, tidak juga menurunkan signifikansi standar pendidikan lain. Harapannya, pemetaan dan percepatan peningkatan mutu menjadi sesuatu yang melekat pada siswa. Memastikan kesuksesan di masa depan terjadi bagi setiap siswa lewat proses pendidikan terencana, bukan hanya di sekolah atau ruang ujian, bukan hanya pada sebagian siswa secara tidak disengaja.

GERAKAN PENDIDIKAN

PELATIHAN TIGA LAPIS: UPAYA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU DALAM BERBAGI

oleh: Itje Chodidjah

Memberikan pelatihan agar guru mampu dan percaya diri untuk berbagi keterampilan kepada sesama kolega guru memiliki peran penting dalam praktik pengembangan profesi. Membekali guru dengan pengetahuan baru memang perlu, namun keterampilan juga tidak kalah penting. Dalam meningkatkan kualitas keterampilan yang sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh guru perlu proses berbagi yang tepat agar tujuan pengembangan diri tercapai.

Dalam tulisan ini, saya ingin berbagi proses yang saya alami dalam peran sebagai master trainer, untuk menyiapkan tiga tingkat pelatihan agar guru berbagi. Pada tingkat pertama, jumlah peserta hanya 13 orang guru ‘pilihan’ yang telah diseleksi dan beberapa dosen LPTK. Dari jumlah itu terpilih 9 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok: kelompok utama, kelompok pendamping, dan kelompok pengamat atau *observer*. Pada level kedua, 9 orang tersebut mem-beri pelatihan kepada 30 orang guru Sekolah Dasar yang dipilih dari 15 sekolah, setiap sekolah ditangani oleh 2 orang guru. Pada level berikutnya,

30 orang guru tersebut diharapkan berbagi kepada 600 orang guru di lingkungan sekolah masing-masing, baik melalui KKG maupun sesi-sesi pelatihan lainnya.

Lantas keterampilan apa yang dilatihkan? Keterampilan yang dilatihkan adalah teknik bercerita dan cara mengintegrasikan pelajaran lain ke dalam cerita. Diyakini bahwa setiap anak senang mendengarkan cerita dan jika mata pelajaran lain disisipkan dalam cerita maka anak-anak lebih cepat menangkap. Di samping itu, tentu saja untuk meningkatkan kualitas literasi anak.

Pelatihan untuk level pertama adalah membahas teknik bercerita dan cara memodifikasi cerita diikuti dengan teori yang melatarbelakanginya. Selain itu, peserta juga harus menguasai teknik bercerita dan dapat melakukannya dengan tepat. Pada akhir 18 jam pelatihan, peserta harus dapat mempraktikkan cara bercerita yang tepat: intonasi, suara, penggalan, serta komponen-komponen bercerita lainnya. Mereka juga melakukan praktik modifikasi beberapa cerita. Dalam setiap aktivitas selalu ada kegiatan refleksi untuk memperkuat pemahaman.

Pada level kedua, jumlah jam pelatihan sama, yaitu 18 jam. Fasilitator dalam pelatihan tersebut adalah peserta dari tingkat satu yang terpilih. Jumlah peserta pada level kedua ini adalah 30 orang guru. Mereka terbagi dalam 3 kelas dan di bawah bimbingan 3 orang pelatih, yaitu seorang pelatih utama, seorang pelatih pendamping, dan seorang pelatih pengamat. Pada tahap ini peran *master trainer* masih penuh. Peran

penting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai tujuan, memonitor ketat para pelatih dalam proses *delivery*. Pada level ini para peserta dibekali bahan pelatihan yang akan dilakukan dalam bentuk *sharing session* selama 6 jam (1 hari) dengan sesama kolega mereka dari sekolah lain.

Bahan pelatihan pada level ini lebih memfokuskan pada membuat peserta menguasai keterampilan bercerita. Sedangkan kemampuan mengintegrasikan pelajaran lain ke dalam cerita tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pada saat berbagi dengan kolega, mereka diharapkan sama-sama berlatih untuk bercerita dan menyadari pentingnya aspek-aspek dalam bercerita, seperti variasi suara, intonasi,

kontak mata, dsb. dalam mengajar. Walaupun belum mampu mengintegrasikan sendiri mata pelajaran lain dalam cerita, mereka juga menyadari bahwa hal tersebut dapat dilakukan.

Dalam kegiatan pengembangan profesi yang melibatkan guru dalam jumlah besar dan berasal dari berbagai sekolah, maka memastikan materi, tujuan, serta metode pelatihan menjadi suatu keharusan. Model pelatihan ini diharapkan mampu mencapai tujuan utama, yaitu memampukan guru untuk terampil dalam bercerita dan menyadari bahwa pelajaran lain dapat diintegrasikan dalam cerita. Dengan kata lain, meminta guru untuk berbagi keterampilan tanpa membuat mereka sendiri mampu terlebih dahulu adalah sia-sia belaka.

AGENDA PSPK

PESTA PENDIDIKAN BARENGAN

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan terlibat dalam inisiatif Pesta Pendidikan Barengan. Acara ini diselenggarakan oleh berbagai komunitas pendidikan dan nonpendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional pada Mei 2016. PSPK akan menerbitkan seri buku tentang tokoh pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menyebarkan pandangan dan pemikiran beberapa pahlawan pendidikan agar menginspirasi masyarakat umum dalam bergerak, belajar, dan bermakna bersama.

Pada 1 Mei 2016, sekaligus sebagai pembuka dari rangkaian acara Pesta Pendidikan, 2 judul buku tentang Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Soetomo akan diluncurkan. *Belajar dari Ki Hadjar* berisi kumpulan pemikiran tokoh pendidikan Indonesia ini yang dikutip dari berbagai tulisan Ki Hadjar Dewantara. Disertai ilustrasi dan dengan warna yang menarik, diharapkan buku ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa pun yang peduli akan pendidikan serta lebih menyebarkan pandangan-pandangan Ki Hadjar akan pendidikan yang sudah sepatutnya diimplementasikan dalam sistem pendidikan kita. Demikian juga dengan buku *Budi dari Soetomo* tentang pandangan dan pemikiran Dr. Soetomo akan dikemas tak jauh berbeda.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) adalah lembaga riset non-profit yang fokus pada inovasi, isu pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang memiliki dampak luas terhadap dinamika ekosistem pendidikan di daerah-daerah.

Mengacu pada dinamika terbukanya kesempatan keterlibatan publik dan advokasi kebijakan pada periode pemerintahan saat ini, maka lembaga riset PSPK didirikan untuk berkolaborasi menjadi mitra independen bagi pemerintah di bidang pendidikan.